



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOFRIADI RONI PUSKA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 230888

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **910.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/144 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 13.650 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 23.071 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 11.600 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **129.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 211.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.342.673

F. HARTA LAINNYA Rp. 3.379.910

Sub Total Rp. 1.344.222.583

III. HUTANG Rp. 76.492.985

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.267.729.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.